

SKRIPSI

**PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PENGAWASAN PENGGUNAAN DANA
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI SDN WADUKOPA
KECAMATAN SOROMANDI KABUPATEN BIMA**

*DiAjukan Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Gelar S. IP (S1)
Dalam Ilmu Pemerintahan*



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PENGAWASAN PENGGUNAAN DANA
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI SDN WADUKOPA
KECAMATAN SOROMANDI KABUPATEN BIMA**

Telah memenuhi syarat dan disetujui

Tanggal, 10 / 05 / 2023

Dosen Pembimbing I

Drs. H. Abdurrahman, M.M
NIDN.0804116101

Dosen Pembimbing II

Lalu Hendra Maniza, S.SOs., M.M
NIDN.082808484

Menyetujui:

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Ketua Program Studi,



Yudi Lestonata, S.IP., M.IP

NIDN.0827118801

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI

**PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PENGAWASAN PENGGUNAAN DANA
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI SDN WADUKOPA
KECAMATAN SOROMANDI KABUPATEN BIMA**

Skripsi atas nama Liana telah dipertahankan di depan dosen penguji Program Studi
Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu Politik Universitas

Muhammadiyah Mataram

Tanggal, 10 Mei 2023

Dosen Penguji

1. Drs. Abdurrahman, MM (Ketua) (.....)
NIDN 0804116101
2. Lalu Hendra Maniza, S.Sos., (Anggota) (.....)
NIDN 0828108404
3. Dr.Iwan Tanjung Sutarna, S.IP., M.PA (Anggota) (.....)
NIDN 0806058402

Mengesahkan,

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


Dekan
Dr. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

LEMBARAN PERNYATAAN KARYA TULIS

Dengan ini saya menyatakan;

1. Skripsi ini berjudul “Partisipasi Masyarakat Dan Pengawasan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Di SDN Wadukopa Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima”.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli atau ciplakan dari orang lain maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 19 Mei 2023

Yang membuat pernyataan



Liana
2019B1D072



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram

*Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Liana
 NIM : 20191310072
 Tempat/Tgl Lahir : wadukopa 01, february 2000
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Fakultas : FISIPOL
 No. Hp : 082340850149
 Email : lianalwifin7@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

partisipasi masyarakat dan pengawasan penggunaan dana Bantuan
 operasional sekolah (BOS) di SDU wadukopa kecamatan sopomandi
 kabupaten Bima

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 50%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 06 mri2023
 Penulis



Liana
 NIM. 20191310072

Mengetahui,
 Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A. wly
 NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Liana
 NIM : 20191310072
 Tempat/Tgl Lahir : wadukora 01 februari 2000
 Program Studi : ilmu pemerintahan
 Fakultas : Fisipol
 No. Hp/Email : lianawtfin@gmail.com
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Partisipasi masyarakat dan pengawasan pengurusan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di SDN wadukora kecamatan Soromandi kabupaten Bima

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 06 juni 2023
 Penulis

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Liana
 NIM. 20191310072


Iskandar, S.Sos.,M.A.
 NIDN. 0802048904 usly

MOTTO

“Memulailah dengan bismillah, dan menyelesaikan dengan Alhamdulillah”

Liana 2023



PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati skripsi ini aku persembahkan kepada:

1. Ucapan syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT atas segala kebesaran dan keajaiban yang kutemui dalam separuh perjalanan akademisku, serta sembah sujud atas kemudahan limpahan rahmat berupa kesehatan yang engkau berikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Kedua orang tuaku tercinta, yang selalu memberikan yang terbaik untukku. Teruslah berdoa dan menyayangiku, karena dengan do'a dan segenap cinta kasih kalian, aku bisa bertahan menghadapi kehidupan. Walaupun tidak pernah kuungkapkan lewat bibirku, tapi mataku, tubuhku, jiwaku, dan ragaku menyayangi dan mencintaimu melebihi kecintaanku kepada diriku sendiri, hanya doa dan rasa terima kasih tiada tara yang bisa kuberikan kepadamu wahai pahlawan abadi.
3. Kakakku – adikku yang ku sayangi (,Yudhi,Efi,fitri), dengan sekuat tenaga telah menyemangati serta memperhatikannku selama dalam proses menyelesaikan skripsi dan studi S-1.
4. Paman dan bibi serta keluarga besar yang selalu memberi nasehat, dan semangat kepadaku selama dalam proses menyelesaikan skripsi dan studi S-1.
5. Dosen pembimbing 1 dan pembimbing 11 (Drs. Abdurrahman, MM. Lalu Hendra Maniza, S.Sos.,MM dan Dr. Iwan Tanjung Sutarna. S,IP.,M.PA) yang selalu memberikanku semangat dan motivasi, selalu setia menegur dan mendampingiku dalam proses menyelesaikan skripsi.
6. Terimakasih untuk teman-teman kelas C yang selalu ada untuk membantu dalam segala hal. Terutama sahabat-sahabatku yang senantiasa menemani dalam suka dan duka.
7. Sahabat setiaku Ardiati,Fadlun,Yati,Eti,Sirma,Nurfa terima kasih atas dukungan tulusnya dalam memberikan semangat selama dalam perkuliahan dan juga penyusun skripsi.
8. Almamater tercinta, yang sudah menemani selama 4 tahun ini.

KATA PENGANTAR

Puja dan Puji syukur hanya milik Allah SWT karena atas izin dan kehendakNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Partisipasi Masyarakat Dan Pengawasan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) di SDN Wadukopa Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima”** yang dapat penulis rampungkan tepat pada waktunya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak mungkin akan terwujud apabila tidak ada bantuan dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini izinkan saya menyampaikan ucapan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. Abdul Wahab, MA selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.S.i selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Yudhi Lestenata, S.IP., M.IP. selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Drs. Abdurrahman, MM. selaku pembimbing I dan Bapak Lalu Hendra Maniza, S.Sos.,MM .selaku pembimbing II yang telah memperkenankan waktu dan ilmunya untuk mengarahkan dan memotivasi penulis.
5. Seluruh Dosen dan Staff Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram yang tidak dapat

penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala ilmu dan pengarahan yang telah diberikan kepada penulis

Mataram, 19 Mei 2023

Penulis

Liana



**PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PENGAWASAN PENGGUNAAN DANA
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI SDN WADUKOPA
KECAMATAN SOROMANDI KABUPATEN BIMA**

Pembimbing I : Drs.Abdurrahman, MM

Pembimbing II : Lalu Hendra Maniza, S.Sos., MM

ABSTRAK

Bentuk partisipasi masyarakat yang mereka berikan ke sekolah SD Wadukopa Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima berupa; (a) Tenaga; (b) Dana/Uang; (c) Material/barang. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat terhadap program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan untuk mengetahui pelaksanaan Terhadap program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SDN Wadukopa Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima. Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan tehnik pengumpulan data: observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini yaitu data reduction data dan data display. Hasil penelitian dengan menunjukkan bahwa (1) partisipasi masyarakat terhadap Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN Wadukopa Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima sangat tinggi, hal ini dilihat dari keikutsertaan masyarakat dalam musyawarah, pendampingan pengawasan, partisipasi pada pengelolaan dana BOS dan Transparansi penyaluran dana BOS. (2) pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SDN Wadukopa Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, telah berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan telah berjalannya proses perencanaan, pengelolaan dan pelaporan. Ketiga hal tersebut sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti dalam perencanaan sekolah mengadakan antara kepala sekolah, guru, komite sekolah dan penjaga sekolah untuk membahas apa saja kebutuhan yang diperlukan sekolah dan guru guna menunjang proses pembelajaran.

**Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat dan Pengawasan Penggunaan Dana
Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

**COMMUNITY PARTICIPATION AND SUPERVISION OF THE USE OF
SCHOOL OPERATIONAL ASSISTANCE (BOS) FUNDS AT SDN WADUKOPA,
SOROMANDI DISTRICT, BIMA REGENCY**

Consultant I : Drs.Abdurrahman, MM

Consultant II : Lalu Hendra Maniza, S.Sos., MM

ABSTRACT

The form of community participation that they gave to SD Wadukopa, Soromandi District, Bima Regency was in the form of; (a) Power; (b) Funds/Money; (c) Materials/goods. The School Operational Assistance (BOS) program will be implemented in SDN Wadukopa, Soromandi District, and Bima Regency, according to the results of a study conducted to gauge community engagement in the program. This kind of qualitative study adopts a descriptive methodology and use methods for gathering data like observation, interviews, and documentation. In this study, data reduction and data visualization are both types of data analysis. The study's findings showed that (1) there was a very high level of community involvement in the School Operational Assistance Program (BOS) at SDN Wadukopa, Soromandi District, and Bima Regency. (2) As shown by the development of the planning, administration, and reporting processes, the School Operational Assistance (BOS) program has been implemented successfully for SDN Wadukopa, Soromandi District, and Bima Regency. These three actions have been taken in line with the law, such as during meetings held between the principle, teachers, school committee, and school caretakers during school planning sessions to talk about what the school and instructors need to support the teaching and learning process.

Keywords: Community Participation and Supervision of the Use of School Operational Assistance Funds (BOS)

**MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM**

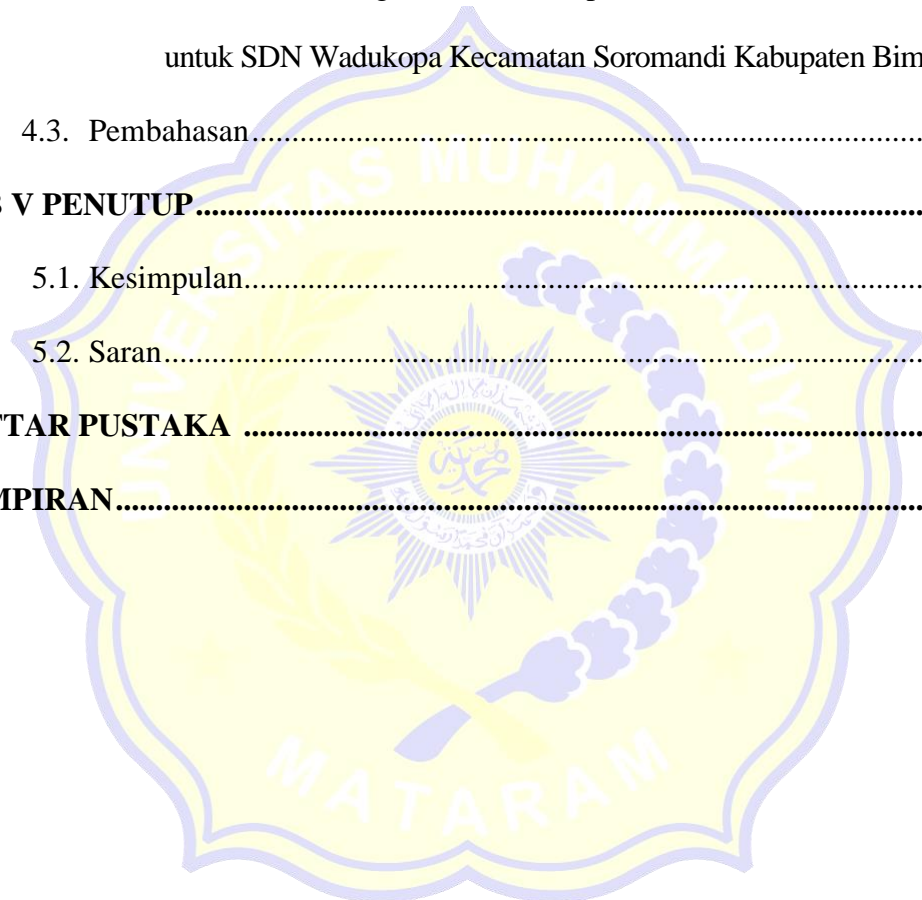


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KARYA TULIS.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	v
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Penelitian Terdahulu.....	10

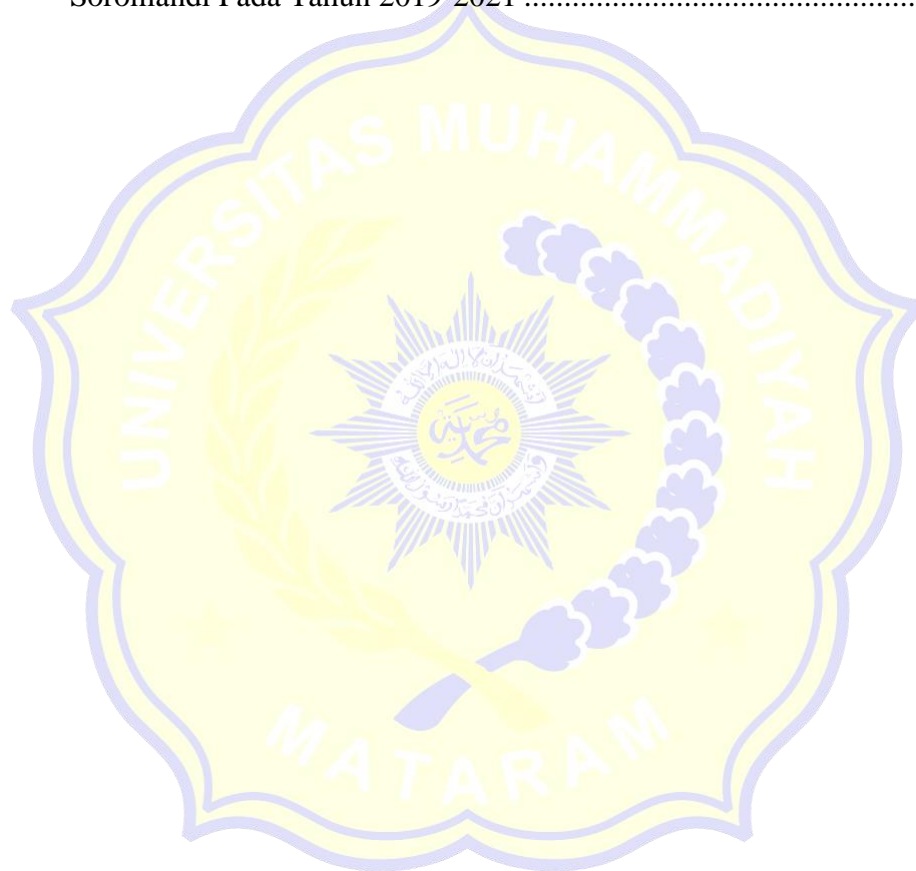
2.2 Tinjauan Teori	12
2.2.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat	12
2.2.2 Pengertian Pengawasan	15
2.2.3 Indikator Tingkat Partisipasi Masyarakat	17
2.2.4 Faktor Penyebab Partisipasi Sekolah	18
2.2.5 Pengertian Pengawasan	19
2.2.6 Pengelolaan	21
2.2.7 Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	23
2.3 Kerangka Pemikiran	24
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Jenis Dan Pendekatan Penelitian	28
3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian	29
3.3 Teknik Penentuan Informan	30
3.4 Jenis dan Sumber Data	30
3.5 Teknik Pengumpulan Data	32
3.6 Teknik Analisis Data	35
3.7 Keabsahan Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
4.1.1. Profil SDN Wadukopa Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima	38
4.1.2. Visi dan Misi	38
4.1.3. Struktur Organisasi	39

4.1.4. Tugas dan Tanggungjawab	39
4.2. Hasil Penelitian	41
4.2.1. Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN Wadukopa Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima.....	41
4.2.2. Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SDN Wadukopa Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima ..	47
4.3. Pembahasan.....	55
BAB V PENUTUP	63
5.1. Kesimpulan.....	63
5.2. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN.....	68



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Angka Partisipasi Sekolah Di Kabupaten Bima, Tahun 2017-2021	4
Tabel 1.2 Jumlah Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SDN Wadukopa Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima Periode 2018-2021	6
Tabel 3.1 Sumber Data.....	32
Tabel 4.1 Penyaluran Dana BOS SDN Wadukopa Kecamatan Soromandi pada Tahun 2018-2022.....	48
Tabel 4.2 Keberhasilan Penggunaan Dana BOS SDN Wadukopa Kecamatan Soromandi Pada Tahun 2019-2021	48



DAFTAR GAMBAR

Gambar. 2.1 Kerangka Pemikiran.....	27
Gambar 4.1 Struktur Organisasi SD Negeri Wadukopa	39



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian.....	69
Lampiran 2. Lembar Konsultasi Penelitian.....	70
Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian.....	72



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan adalah kegiatan yang dapat diartikan, diarahkan dan direncanakan sebagai upaya untuk menciptakan suasana dan proses belajar sedemikian rupa sehingga peserta didik secara aktif mengembangkan potensi, kecerdasan, martabat, dan keterampilan yang dibutuhkan dirinya dan masyarakat. Pendidikan merupakan salah satu hal terpenting dalam tujuan bangsa Indonesia, yaitu pendidikan anak bangsa. Pada dasarnya pengertian pendidikan dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 yaitu suatu cara dan upaya yang terencana dalam rangka menciptakan suasana belajar dan proses belajar yang aktif bagi peserta didik, mengembangkan untuk memiliki akhlak dan kesadaran spiritual yang baik, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang baik dan optimal. Sehubungan dengan semakin berkembangnya dunia pendidikan, persaingan perusahaan dalam pengelolaan pendidikan tidak dapat dipungkiri. Banyak juga kegiatan yang harus dikelola pengelola pelatihan, baik dari segi jenis kegiatan, jumlah kegiatan, maupun biaya kegiatan. Agar manajemen pendidikan dapat berfungsi dengan sempurna, maka manajemen pendidikan harus terus dikembangkan dan ditingkatkan.

Indikator keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan pendidikan penduduk adalah angka partisipasi sekolah (APS), angka partisipasi murni (APM),

Angka Partisipasi kasar (APK) (BPS, 2015: 36). Angka Partisipasi Sekolah (APS) mengukur daya serap pendidikan penduduk usia sekolah. Angka Kasar (APK) adalah proporsi penduduk yang masih bersekolah pada tingkat pendidikan tertentu terhadap penduduk kelompok umur yang sesuai dengan tingkat pendidikannya. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk suatu kelompok usia pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok usianya, relatif terhadap jumlah penduduk kelompok usia tersebut.

Penting bagi sekolah untuk memiliki hubungan dengan partisipasi masyarakat untuk memberikan layanan khusus yang optimal seperti kegiatan ekstrakurikuler. Mendikbud Muhadjir Effendy menjelaskan bahwa keberhasilan pendidikan terdiri dari tiga bagian penting yaitu sekolah, keluarga dan masyarakat (News, 2016). Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa sekolah merupakan tempat digalakkannya pendidikan, keberhasilan pendidikan memerlukan kerjasama masyarakat. Partisipasi Masyarakat terdapat pada UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pada Bab IV, pasal 7 “Orang tua memiliki hak untuk memilih satuan pendidikan dan mendapatkan informasi perkembangan anaknya, dan wajib memberikan pendidikan dasar pada anaknya”, 8 & 9 (Masyarakat berhak ikut dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan wajib memberikan dukungan sumber daya pada penyelenggaraan pendidikan).

Bentuk partisipasi masyarakat yang mereka berikan ke sekolah SD Wadukopa Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima berupa; (a) kekuatan; (b)

harta/uang; (c) bahan/barang, sedangkan pendapat Konkoni (Syamsudin & Damayanti, 2011: 41) Bentuk partisipasi masyarakat ada empat, yaitu: (a) sumbangan materiil, (b) sumbangan finansial, (c) sumbangan materil, (d) sumbangan tidak berwujud berupa gagasan dan saran. Pernyataan di atas menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat dapat berupa tenaga/jasa, pendanaan/dana, materi/barang dan saran yang diberikan. Bentuk partisipasi masyarakat menurut pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 (Suryosubroto, 2002: 84) berbentuk: (a) Pendirian dalam penyelenggaraan pendidikan seperti sekolah formal maupun non formal, dan penyelenggaraan program pendidikan, (b) Pengadaan pemberian tenaga pendidikan dan tenaga ahli, (c) Pemberian bantuan dan pengadaan dana untuk pengadaan buku pelajaran dan peralatan pembelajaran, bantuan ruangan, gedung dan tanah, (d) Pemberian bantuan berupa pemikiran dalam penyelenggaraan pendidikan, memberikan tenaga dalam pelaksanaan kegiatan dan program sekolah. Pasal 5 menyebutkan pemberian bantuan tersebut dapat dikategorikan wajib maupun sukarela oleh masyarakat. Bentuk-bentuk partisipasi yang dilakukan oleh Wibowo (2001) dan diulas dalam buku karya Imron (2017): 54) bentuk-bentuk ini dalam empat: (a) partisipasi orang tua peserta didik dalam program pendidikan, (b) partisipasi penguatan pendidikan, (c) partisipasi pembiayaan pendidikan, (d) kemandirian sekolah dalam pemenuhan otonomi daerah.

Angka partisipasi sekolah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dan menjadi indikator untuk mengetahui kemajuan pendidikan suatu daerah” menurut Andini, Andini Dewi

&Yusrawati., (2015:106). Angka Partisipasi Sekolah merupakan indikator dasar yang digunakan untuk mengukur akses penduduk usia sekolah terhadap lembaga pendidikan. Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) juga menjadi tolak ukur keberhasilan pendidikan daerah. Hal ini menunjukkan kekayaan daerah tersebut.

Tabel 1.1
Angka Partisipasi Sekolah Di Kabupaten Bima, Tahun 2017-2021

Sekolah	Tahun	Angka Partisipasi Sekolah (APS)
SDN	2017	99,09
	2018	100,00
	2019	98,00
	2020	99,71
	2021	99,83

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bima

Berdasarkan data tersebut maka bisa diketahui bahwa APS pada jenjang SDN di Kabupaten Bima dari tahun ke tahun mengalami peningkatan presentase, yaitu dari tahun 2017 sampai 2021. Hal ini menyebabkan Proporsi penduduk miskin di Dompu mengalami penurunan yang tidak terlalu signifikan namun tetap tinggi. tingkat pendaftaran pada jenjang SDN tiap tahunnya sedikit demi sedikit mengalami peningkatan, dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bima pun tiap tahun semakin turun, namun masih tergolong dalam presentase yang tinggi.

Pendaftaran di sekolah tinggi terkait dengan kemiskinan. Hal ini tercermin dari 35,9 persen anak perkotaan dan pedesaan antara usia 7 dan 17 tahun yang tidak bersekolah karena kekurangan uang. Alasan inilah yang paling sering dikemukakan, meski bukan satu-satunya faktor penyebab anak putus sekolah. Berdasarkan permasalahan tersebut, Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan mengembangkan program rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada pendidikan menengah dari SMP hingga SMA. Oleh karena itu, pemerintah menyusun Pedoman Teknis BOS (JUKNIS) dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019, dan diharapkan sekolah dapat melaksanakan yayasan BOS berdasarkan JUKNIS yang telah direncanakan sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari potensi aktivitas penipuan.

Kebijakan pendanaan BOS diawali dengan kenaikan harga minyak pemanas (BBM) pada tahun 2005 yang menyebabkan pemerintah mengurangi subsidi BBM. Untuk mengatasi dampak kenaikan harga BBM, pemerintah mengalokasikan sebagian besar anggarannya untuk empat program utama, yakni Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur Perdesaan, dan Subsidi Langsung Tunai (SLT). Salah satu program di bidang pendidikan adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang membantu sekolah mengurangi biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu, dan memudahkan siswa lainnya.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pada pelayanan pendidikan tersebut, maka pemerintah dengan konsep desentralisasi dan otonomi daerah menyediakan dan memfasilitasi pelayanan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk dapat membantu satuan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Penyelenggaraan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah merupakan salah satu pelayanan jasa. Bantuan Operasionaln Siswa (BOS) untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun. Program ini diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang

pendistribusian, penggunaan dan tanggung jawabnya menjadi tanggung jawab para pihak mulai dari menteri hingga kepala sekolah pada satuan pendidikan penerima dana BOS.

Tabel 1.2

Jumlah Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SDN Wadukopa Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima Periode 2018-2021

Tahun Anggaran	Jumlah Siswa	Alokasi Dana BOS Yang Diterima
2018	104	93.6000.000
2019	107	96.300.000
2020	120	114.400.000
2021	128	121.600.000

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bima

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti bersama Kepala Sekolah jumlah siswa di SDN Wadukopa Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima pada tahun 2018 adalah sebanyak 104 murid dengan total dana yang disalurkan sebesar Rp. 93.6000.000 kemudian pada tahun 2019 sebanyak 107 murid dengan total dana BOS yang diterima sebanyak Rp. 96.300.000. pada tahun 2020 sebanyak 120 siswa dengan total penyaluran dana yang diterima sebesar Rp. 114.400.000. dan pada tahun 2021 dengan total Dana yang diterima sebesar 121.600.000 meningkat dengan cara yang tidak sama selama 2 tahun terakhir. Bisa dilihat di table tersebut jumlah siswa dan penyaluran dana BOS meningkat.

Salah satu objek yang dijadikan dalam pengelolaan keuangan dana BOS adalah di SDN Wadukopa Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima merupakan salah satu organisasi pemerintahan tentunya dalam bidang pendidikan yang harus mempertanggungjawabkan segala pelaporan

keuangannya baik kepada masyarakat dan pemerintah. Sebagai suatu organisasi yang bernaung dalam pendidikan di SDN Wadukopa Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima tentu saja memiliki berbagai bentuk pengelolaan keuangan. Selama ini pengelolaan keuangan yang ada di tingkat sekolah dapat dikatakan sederhana, karena bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang berupa laporan keuangan belum didukung oleh standar - standar yang memadai. Dilihat juga dari penerimaan peserta didik baru yang meningkat serta prestasi siswa yang tentunya semakin meningkat.

Tujuan program Bantuan Operasi Sekolah yang diterbitkan oleh pemerintah di SDN Wadukopa Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima adalah untuk menyelenggarakan pendidikan serta terbebas biaya pendidikan untuk peserta didik kurang mampu agar mereka mendapatkan layanan pendidikan dasar yang lebih baik serta berkualitas di bawah Pendidikan Dasar 9 Tahun (WAJAR DIKDAS). Berkaitan untuk hal itu dapat disimpulkan bahwa SDN Wadukopa Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima sudah dapat dibiayai dari dana BOS, namun tidak semua kegiatan sekolah dapat dibiayai oleh dana BOS. Keterlibatan warga sekolah, termasuk kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan wali murid, merupakan parameter yang tidak terpisahkan dalam penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS. Mengacu pada latar belakang diatas, maka penulis mengambil penelitian dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dan Pengawasan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) di SDN Wadukopa Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat terhadap program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN Wadukopa Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima?
2. Bagaimana pelaksanaan Terhadap program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SDN Wadukopa Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat terhadap program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN Wadukopa Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima.
2. Untuk Mengetahui pelaksanaan Terhadap program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SDN Wadukopa Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis
 - 1) ebagai syarat untuk menyelesaikan skripsi mahasiswa untuk memperoleh gelar Sarjana (S.IP) Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Mataram.
 - 2) Pemerolehan informasi tambahan yang penting untuk meningkatkan kompetensi, kecerdasan intelektual dan emosional serta kesempatan untuk menerapkan ilmu teori yang diperoleh di perkuliahan.

3) Untuk mengetahui lebih mendalam terkait dengan Pengelolaan/
Penggunaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN
Wadukopa Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima

2. Bagi Mahasiswa

Untuk buku referensi acuan mahasiswa Universitas Muhammadiyah
Mataram khususnya perbankan yang kemudian dipresentasikan dalam
penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian pendahuluan adalah cara peneliti dalam mencari pembandingan serta referensi baru untuk penelitian selanjutnya. Penelitian sebelumnya berguna bagi peneliti menemukan penelitian sertamenunjukkan keaslian penelitian.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini, peneliti menemukan beberapa penelitian yang masih berkaitan namun memiliki perbedaan dengan penelitian ini.

1. Heru Wicaksono (2019) “Model Pengelolaan Dan Pengawasan Dana Bantuan Operasional (BOS) di Kota Semarang (Perspektif Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan)”.

Dinas Pendidikan Kota Semarang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan dana BOS di Kota Semarang sesuai dengan arahan atau arahan materi pemeriksaan dan pemeriksaan sekolah yang secara mandiri mengelola dana bantuan operasional tersebut. Namun pengawasan Pendidikan dibantu erat oleh Inspektorat Kota Semarang dalam melakukan pengawasan. BPK Kota Semarang memiliki peran yang lebih spesifik dalam pengawasan dana pendampingan usaha. Keterbatasan terkait pelaksanaan Pengelolaan dan pengawasan Dana Bantuan Operasional Kota Semarang menjadi tantangan bagi Dinas Pendidikan

Kota Semarang dan Biro Pemeriksa Keuangan Kota Semarang untuk berbenah. Namun, Biro Inspeksi Kota Semarang sangat mendukung Dinas Pendidikan dalam melakukan inspeksi. BPK Kota Semarang memiliki peran yang lebih spesifik dalam mengawasi dana bantuan perusahaan.

2. Andriyanto (2015) “Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Dana Bos (Bantuan Operasional Sekolah) Oleh Dinas Pendidikan Pekanbaru”.

Efektifitas pelaksanaan pengawasan dana BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru sudah baik menurut sistem pengawasan, namun masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan di bidang pengawasan. Hal ini tercermin dari pemberian sanksi atas pelanggaran yang tidak tegas dan objektif. Dalam beberapa kasus pelanggaran penggunaan dana BOS, dinas pendidikan masih menganggap pelanggaran itu wajar dan tidak bisa dihindari. Misalnya gaji yang harus dibayarkan kepada guru sukarela yang melebihi ketentuan BOS JUKNIS. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas BOS Foundation Error di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Faktor manusia, jumlah pengawas lapangan tidak sebanding dengan jumlah SD di Pekanbaru. Jumlah pengawas SD hanya ada 50 sementara SD di Pekanbaru dilaporkan sebanyak 279 sekolah. Meskipun regulator telah diberikan waktu yang cukup, hal tersebut dinilai masih belum cukup mengingat peran regulator tidak hanya untuk memantau dana BOS. Faktor pemberian sanksi, sanksi yang diberikan hanya berupa teguran tertulis. Dalam kasus-kasus tertentu, Dinas Pendidikan belum mampu menangani

persoalan pelanggaran dengan baik karena masih menganggap bahwa pelanggaran yang terjadi tidak dapat dihindari.

3. Anisa Rahayu (2017) “Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Sekolah Dasar (SD) di Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung”.

Pelaksanaan pemeriksaan akhir BOS SD oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung berjalan dengan baik berdasarkan proses pemeriksaan yang terdiri dari langkah-langkah penetapan standar, pengukuran hasil, perbandingan dan koreksi penyimpangan yang dirasakan. Selamat mengingat program pendanaan BOS telah berjalan sejak tahun 2005 dan masih berjalan hingga saat ini. Pada tahap standar sesuai dengan petunjuk teknis dari Kemendikbud, pada tahap komparatif laporan sekolah dikontrol dan transparan dengan cara ditempel di papan pengumuman yang dapat dilihat oleh semua orang. Tahap koreksi yang tidak teratur dilakukan dengan pemeriksaan rutin sebelum kesalahan menjadi serius. Oleh karena itu, penyimpangan yang terjadi relatif kecil. Faktor kesalahan yang dihasilkan dari pengendalian relatif kecil karena dapat langsung diatasi dengan tindakan perbaikan.

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat

Menurut Adi Isbandi Rukminto (2007:227), Partisipasi sebagai konsep pembangunan masyarakat bersifat umum dan meluas. Partisipasi merupakan konsep kunci dan prinsip dasar pembangunan

masyarakat, karena partisipasi terkait erat dengan gagasan hak asasi manusia, antara lain. Dalam pengertian ini, partisipasi merupakan tujuan itu sendiri; yaitu partisipasi mengaktifkan gagasan HAM (hak asasi manusia), hak berpartisipasi dalam demokrasi dan memperkuat hak demokrasi untuk berpartisipasi dalam demokrasi dan memperkuat kemampuan untuk berkonsultasi. Sebagai proses pembangunan masyarakat, partisipasi dikaitkan dengan hak asasi manusia dengan cara yang berbeda. Jika hak asasi manusia lebih dari sekedar pernyataan di dalam pernyataan, begitulah. Partisipasi mengarah pada pembangunan budaya hak asasi manusia secara aktif untuk memastikan aliran proses pembangunan masyarakat yang inklusif, merupakan kontribusi penting bagi pembangunan kemanusiaan. Budaya hak asasi manusia, budaya di mana partisipasi warga diharapkan dan proses normal dalam pengambilan keputusan. Partisipasi merupakan sarana sekaligus tujuan, karena merupakan bagian dari basis budaya yang membuka jalan bagi perwujudan hak asasi manusia.

Finna Rizqinna (2010:14), berpendapat bahwa dalam partisipasi harus mencakup kemampuan rakyat untuk memengaruhi kegiatan-kegiatan sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya. Arti partisipasi sering disangkut pautkan dengan banyak kepentingan dan agenda yang berbeda yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat dan pembuatan keputusan secara

politis. Dalam lain hal, Partisipasi masyarakat merupakan hak dan kewajiban warga Negara untuk memberikan kontribusinya kepada pencapaian tujuan kelompok, sehingga mereka diberi kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan dengan menyumbangkan inisiatif dan kreatifitasnya.

Partisipasi masyarakat sering kali dianggap sebagai bagian yang tidak terlepas dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Dengan melihat partisipasi sebagai kesatuan dalam proses pemberdayaan masyarakat, akan dapat diketahui bahwa akar perkembangan pemikiran tentang partisipatif dalam pembangunan akan terkait dengan diskursus komunitas Miriam Budiarjo (2009:381). Dimana salah satu diskursus komunitas adalah asumsi bahwa masyarakat bukanlah sekumpulan orang yang bodoh, yang hanya bisa maju kalau mereka mendapatkan perintah belaka. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Tujuan partisipasi masyarakat yaitu :

- 1) Berupaya untuk memberdayakan rakyat untuk berpartisipasi dalam membangun mereka sendiri secara lebih berarti

- 2) Berupaya untuk menjamin peningkatan peran rakyat dalam inisiatif-inisiatif pembangunan.
- 3) Fokus pada peningkatan kemampuan rakyat untuk berpartisipasi bukan sekadar mencapai tujuan-tujuan proyek yang sudah ditetapkan sebelumnya.
- 4) Pandangan ini relatif kurang disukai oleh badan-badan pemerintah.
- 5) Pada prinsipnya LSM setuju dengan pandangan ini.
- 6) Partisipasi dianggap sebagai suatu proses jangka panjang
- 7) Partisipasi sebagai tujuan relatif lebih aktif dan dinamis.

2.2.2 Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah adalah indicator dasar dalam mengukur akses penduduk terhadap lembaga pendidikan, khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS, semakin banyak masyarakat yang memiliki akses pendidikan. Rumus untuk menghitung APS:

1. $APS (7-12) = \left\{ \frac{\text{Jumlah penduduk berumur 7-12 tahun yang masih sekolah}}{\text{Jumlah penduduk umur 7-12 tahun}} \times 100\% \right\}$
2. $APS (13-15) = \left\{ \frac{\text{Jumlah penduduk berumur 13-15 tahun yang masih sekolah}}{\text{Jumlah penduduk umur 13-15 tahun}} \times 100\% \right\}$
3. $APS (16-18) = \left\{ \frac{\text{Jumlah penduduk berumur 16-18 tahun yang masih sekolah}}{\text{Jumlah penduduk umur 16-18 tahun}} \times 100\% \right\}$

Menurut BPS (2018:45) APS menggambarkan pemanfaatan sistem pendidikan oleh penduduk usia sekolah. APS tinggi berarti sekolah menengah atas untuk kelompok usia tertentu. APS merupakan indikator

baseline yang digunakan terutama dalam menilai akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah. BPS sendiri membagi angka partisipasi sekolah menjadi 2 macam, berupa APK dan APM. APK merupakan perbandingan jumlah penduduk yang bersekolah pada suatu sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan yang dinyatakan dengan APK. Jika jumlah siswa yang bersekolah pada suatu jenjang tertentu melebihi jumlah anak pada batas sekolah menurut jenjang yang bersangkutan, maka nilai APK untuk jenjang tersebut > 100 .

Angka Partisipasi Murni (APM), yang mengukur ketepatan usia suatu penduduk untuk mengikuti suatu jenjang pendidikan tertentu. $APM < APK$ sebab APK memperhitungkan seluruh penduduk putus sekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai, sedangkan APM dibatasi hanya pada usia pada jenjang yang sesuai.

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan melalui berbagai pernyataan ahli tentang angka partisipasi sekolah, dapat disintesis bahwa angka partisipasi sekolah adalah partisipasi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam kegiatan pemerintah seperti program pendidikan, yang dapat diukur sebagai persentase dari populasi dari usia tertentu. Suatu kelompok yang sesuai dengan seluruh populasi kelompok umur itu.

2.2.3 Indikator Tingkat Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan bentuk kontribusi masyarakat untuk mendukung keberhasilan perencanaan pembangunan infrastruktur (Musrenbang) di wilayah terdekat. Menurut Efendi (2002: 46), Partisipasi dibagi menjadi partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal. Partisipasi vertikal adalah partisipasi yang terjadi dalam kondisi tertentu, melibatkan masyarakat atau sebaliknya berpartisipasi dalam program. Dalam hal ini masyarakat berada pada posisi bawahan, pengikut atau pelanggan. Sebaliknya, partisipasi horizontal adalah partisipasi yang terjadi pada saat tidak mustahil mengambil prakarsa di mana setiap anggota/kelompok masyarakat saling berpartisipasi secara horizontal, baik dalam pelaksanaan usaha bersama maupun dalam rangka kegiatan yang bersifat dilakukan dengan pihak lain. Partisipasi horizontal merupakan tanda awal tumbuhnya masyarakat yang berkembang secara mandiri

Tingkat partisipasi masyarakat, dapat diukur dalam beberapa indikator seperti yang dikemukakan Fatma (2007) yaitu pengorganisasian pelaksanaan, sosialisasi, pemberian pelatihan, pengorganisasian masyarakat dan pembentukan pengorganisasian kelompok, pendampingan dan pengawasan. Sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Soekamto, dkk. (2006) kadar partisipasi masyarakat dapat diukur melalui 3 dimensi, yaitu pengembangan kegiatan sosial ekonomi, asas gotong royong dan

keswadayaan, tersedianya dana untuk modal usaha, guna dikembangkan oleh masyarakat miskin itu sendiri.

Dari dua pendapat diatas maka tingkat partisipasi masyarakat penulis dapat menyimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat itu dapat diukur dari adanya kegiatan sosialisasi, pendampingan dan pengawasan partisipasi pada/gotong royong pada pengelolaan kegiatan dan adanya transparansi dalam adanya pelaksanaan kegiatan ini

2.2.4 Faktor Penyebab Partisipasi Sekolah

Menurut Aminah, S (2016: 45) Faktor penyebab rendahnya angka partisipasi sekolah adalah masalah ekonomi yang menjadi faktor utama penyebab rendahnya angka partisipasi sekolah (APS) dan angka partisipasi sekolah tinggi di kalangan masyarakat miskin. Masyarakat ekonomi lemah tidak memiliki cukup uang untuk menyekolahkan anaknya karena pendidikan relatif mahal. Sulit bagi orang dengan kemampuan keuangan yang rendah untuk menanggung biaya yang diperlukan untuk belajar. Selain itu, banyak orang miskin lebih memilih untuk bekerja daripada melanjutkan pendidikan tinggi. Hal ini menjadi tantangan dalam dunia pendidikan Indonesia saat ini, terutama pemerataan pendidikan di seluruh wilayah.

Berlian (2011:22) mengatakan dalam kajiannya bahwa faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya APS antara lain:

- a kemiskinan penduduk

- b Sulit untuk pergi ke sekolah
- c Kurangnya kesempatan pendidikan
- d Rendahnya pendidikan siswa dan motivasi orang tua
- e Kurangnya dukungan pemerintah daerah serta warga untuk pendidikan
- f Faktor sosial budaya

Listyo Budiarto (2012:52) dalam penelitiannya mengatakan “Faktor yang mempengaruhi retensi anak di SMA antara lain konsep diri siswa, factor keluarga, serta faktor SMA tempat mereka bersekolah”.

Sedangkan Windarto (2013:23) mengatakan “Faktor yang mempengaruhi partisipasi anak dalam pendidikan menengah atas adalah lingkungan siswa, informasi pendidikan, kesejahteraan keluarga, dan pemenuhan keluarga”.

2.2.5 Pengertian Pengawasan

Istilah kepemimpinan dikenal dalam administrasi bisnis bersama dengan administrasi bisnis, yaitu sebagai salah satu unsur kegiatan kepemimpinan. Menurut Siswanto Sunarno (2009: 97), Pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu memastikan sesuai dengan rencana. Surveilans berarti mengamati dan memantau dengan berbagai cara seperti: Secara langsung mengamati kegiatan operasional yang sedang berlangsung di lapangan, membaca laporan dan berbagai cara lainnya selama kegiatan operasional sedang

berlangsung. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada penyimpangan yang disengaja dari rencana dan program yang ditentukan selama implementasi.

Marhawati (2018:253) Pengendalian adalah upaya menyeluruh untuk mengendalikan pelaksanaan fungsi-fungsi operasional untuk memastikan bahwa berbagai fungsi tersebut konsisten dengan rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan tersebut dilakukan dengan:

1) Pengawasan langsung

Pengawasan langsung yaitu pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan terhadap bawahannya, pengawasan ini biasanya merupakan pengawasan langsung. Pemantauan langsung dilaksanakan oleh manager atau supervisor secara pribadi melalui observasi, investigasi, inspeksi, inspeksi sendiri di lapangan di tempat kerja serta menerima laporan langsung dari manager. Ini dilakukan dengan pemeriksaan.

2) Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas dalam bentuk laporan bawahan yang jauh. Kontrol tidak langsung dilakukan dengan mempelajari laporan lisan dan tertulis dari eksekutif, mempelajari opini publik, dll, Tanpa hadir.

Dari pernyataan di atas bisa disimpulkan tujuan pengawasan yaitu untuk mengetahui pelaksanaan tugas umum, efisiensi kerja, hasil kerja dan sebagainya, apakah sesuai dengan apa yang direncanakan pengurus atau tidak, apakah ekonomis, untuk melakukan secara efektif dan efisien dan mengukur tingkat kesalahan untuk memperbaikinya menjadi lebih baik.

2.2.6 Pengelolaan

Pengelolaan didefinisikan sebagai sekumpulan pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk menyelesaikan sekumpulan pekerjaan guna mencapai tujuan tertentu. Menurut Solikhatun Ismi (2016:8), Manajemen bersifat material, mulai dari perolehan informasi, perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasi. Manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, perakitan, mengarahkan dan mengarahkan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Proses manajemen menunjukkan tugas pokok seorang manajer/pemimpin, yaitu:

Perencanaan (design), organisasi (organization), leadership (pengarahan) dan control (pengawasan). Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengarahan usaha-usaha organisasi dalam segala aspek agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Kepemimpinan

adalah sesuatu yang diperlukan dan akan selalu ada dalam kehidupan sehari-hari seseorang, baik kehidupan pribadi maupun di tempat kerja, membutuhkan kepemimpinan yang baik untuk hasil atau proses yang baik.

Kepemimpinan diperlukan oleh individu atau kelompok individu, organisasi perusahaan, organisasi sosial atau bahkan organisasi pemerintah yang terbiasa mengatur dan merencanakan segala sesuatu untuk mencapai hasil yang optimal di masa depan. Setiap orang membutuhkan bimbingan karena tanpa bimbingan yang baik semua usaha tidak akan berhasil. Dalam perkembangannya, proses manajemen merupakan langkah-langkah strategis yang juga merupakan keunggulan dari manajemen ini. Ternyata setiap organisasi mempunyai satu atau lebih tujuan yang menentukan arah dan membentuk visi dari unsur-unsur manajemen organisasi yang ada. Tujuan yang dicapai kemudian tentu saja merupakan prasyarat yang lebih baik daripada di awal. Dalam perkembangannya, manajemen berfungsi untuk memandu organisasi.

Tujuan utama pengelolaan dana pendidikan khususnya keuangan sekolah adalah:

- 1) Menjamin agar dana yang tersedia dipergunakan untuk harian sekolah dan menggunakan kelebihan dana untuk diinvestasikan kembali.
- 2) Memelihara barang-barang (aset) sekolah.

- 3) Menjaga agar peraturan-peraturan serta praktik penerimaan, pencatatan, dan pengeluaran uang diketahui dan dilaksanakan.

2.2.7 Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Menurut Sumarni (2015:226), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program pemerintah untuk membiayai biaya materi satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan wajib belajar. Namun, beberapa kegiatan lain dapat dibiayai dengan dana BOS, yang diklasifikasikan sebagai biaya pegawai dan biaya modal. BOS adalah program pemerintah yang pada hakekatnya ditujukan untuk membiayai biaya materi satuan pendidikan dasar yang melaksanakan program wajib belajar 12 tahun. Banyak program yang dilaksanakan untuk menyetarakan pendidikan dasar 12 tahun dan meningkatkan kualitasnya.

Program-program tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- 1) Program perluasan pemerataan dan akses.
- 2) Program peningkatan mutu, relevansi dan daya saing.
- 3) Manajemen, akuntabilitas dan program pencapaian.

Sementara tujuan utama program BOS adalah pemerataan dan perluasan akses, program BOS juga merupakan program untuk meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing, serta tata kelola, akuntabilitas dan citra publik.

Tujuan dari bantuan operasional sekolah adalah:

- 1) Membebaskan semua siswa SD miskin dari beban biaya operasional sekolah di sekolah negeri dan swasta.
- 2) Menggratiskan semua siswa SD dan SMP negeri untuk biaya operasional sekolah, kecuali rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah dasar internasional (SBI).
- 3) Mengurangi beban biaya operasional sekolah pada siswa di sekolah swasta.
- 4) 4) Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas belajar siswa.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kajian teoritis dan analisis hasil penelitian yang relevan, dikembangkan kerangka acuan yang dapat memandu jalannya penelitian ini secara lebih sistematis. Konstruksi teori ini mencoba menjelaskan keterlibatan masyarakat dalam peningkatan mutu sekolah. Penelitian ini berlandaskan pada UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 54 dan 56 mengenai peran serta masyarakat dalam pendidikan. Partisipasi masyarakat dan kesadaran akan tanggung jawab terhadap pendidikan merupakan syarat yang harus diwujudkan dalam penyelenggaraan pendidikan. Partisipasi masyarakat yaitu Orang tua dan anggota masyarakat, dapat secara sukarela, mengambil keputusan, berpikir dan membiayai. Keterlibatan masyarakat diharapkan terus berjalan lancar untuk meningkatkan kualitas sekolah.

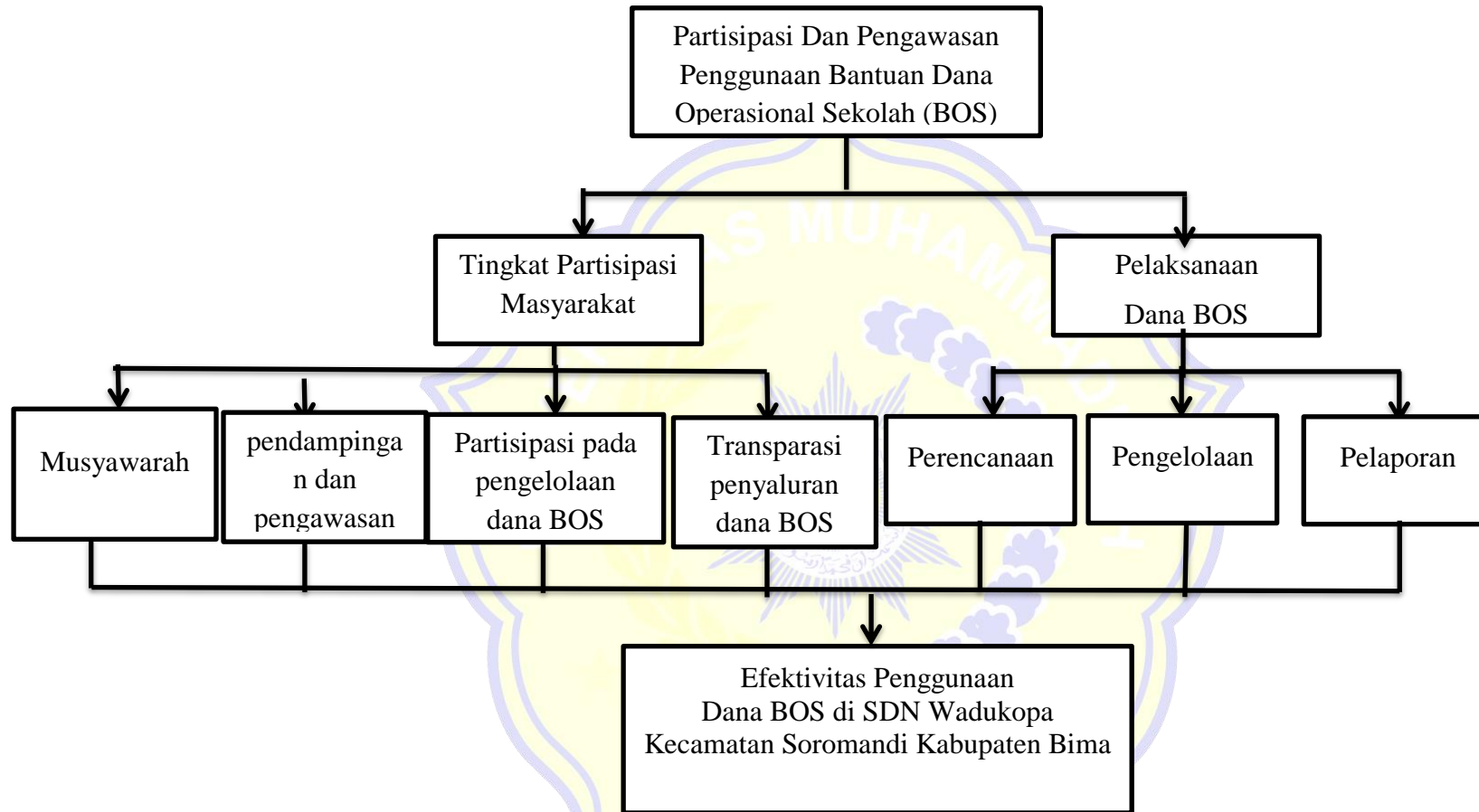
Menurut Ananto (2017:29), saat ini pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab semua anggota masyarakat. Dengan demikian, pengawasan terhadap penggunaan anggaran pun harus dilakukan bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Kebutuhan setiap sekolah berbeda-beda sehingga penggunaan dana pun berbeda sesuai prioritas masing-masing. Tidak bisa lagi sekarang ini jumlah dana diseragamkan semua sekolah. Ada sekolah memanfaatkan dana BOS untuk pelatihan guru, pengadaan buku pelajaran, pembelian peralatan, dan lain-lain. Semua itu merupakan bagian dari peningkatan kualitas pendidikan.

Partisipasi masyarakat dan kesadaran akan tanggung jawab terhadap pendidikan merupakan syarat yang harus diwujudkan dalam penyelenggaraan pendidikan. Partisipasi masyarakat, yaitu Orang tua dan anggota masyarakat dapat menjadi sukarelawan, mengambil keputusan, berpikir dan membiayai. Tingkat partisipasi masyarakat terhadap dana BOS, dapat diukur dalam beberapa indikator seperti yang dikemukakan Fatma (2007) yaitu, sosialisasi kepada masyarakat terdapat dana BOS, pendampingan dan pengawasan, pengelolaan dana BOS, dan transparansi penyaluran dana BOS

Dalam sistem pengelolaan keuangan sekolah, yang terdiri dari perencanaan program sekolah, perkiraan pendapatan dan pengeluaran dalam pelaksanaan program, persetujuan dan penggunaan anggaran sekolah. Kegiatan pengelolaan keuangan untuk merencanakan kebutuhan keuangan operasional sekolah dengan tujuan memperoleh dana yang disusun dalam pembukuan yang transparan, sehingga pelaksanaan program sekolah dapat

dibiayai secara efektif dan efisien. Pengawasan yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dilaksanakan oleh TIM BOS Kabupaten selaku penanggung jawab Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bima. Rerangka konseptual digambarkan sebagai berikut:





Gambar. 2.2 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

3.1.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian yaitu proses yang merupakan kegiatan yang melibatkan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis data. Penelitian juga melaksanakan kegiatan secara teratur serta terencana, mulai dari menyiapkan atau merencanakan penelitian hingga menghasilkan laporan penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2016: 5) menulis bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan informasi dalam lingkungan alam, dengan menggunakan metode alam, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang berkepentingan secara alami.

Sedangkan (Bogdan dan Taylor, 2012: 3) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai teknik penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan tentang orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Penggunaan pendekatan kualitatif ini antara lain didasarkan pada kenyataan bahwa pendekatan ini dapat membantu peneliti dengan memperjelas realitas yang dihadapi di lapangan. Hal ini juga bisa mempermudah peneliti berinteraksi langsung dengan subyek penelitian partisipasi masyarakat dan pengawasan penggunaan dana Bantuan

Operasional Sekolah (BOS) di SDN Wadukopa Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima.

3.1.2 Jenis Penelitian

Dilihat dari sifat rencana penelitian, penelitian ini bersifat deskriptif; penelitian tidak bertujuan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya untuk menggambarkan apa variabel, gejala atau situasi. Oleh karena itu, laporan penelitian berisi kutipan data yang memberikan gambaran umum tentang penyajian laporan. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, catatan atau memorandum, dan dokumen resmi lainnya. Untuk itu penulis bermaksud menjabarkan tentang partisipasi masyarakat dan pengawasan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN Wadukopa Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yaitu tempat berlangsungnya alur penelitian untuk memecahkan masalah penelitian. Pemilihan tempat penelitian mesti berdasarkan pemikiran yang baik supaya dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang dibuat.

Tempat penelitian dilakukan di SDN Wadukopa Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, karena saya rasa di SDN Wadukopa Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima tersebut lebih dekat dengan tempat tinggal peneliti serta bukan mudah dalam melaksanakan wawancara, tanya jawab, atau pengumpulan data. Waktu yang diperlukan oleh peneliti untuk penelitian yaitu dari bulan Desember sampai akhir.

3.3 Teknik Penentuan informan

Sumber informasi mengacu pada siapa, apa dan dimana informan focus penelitian didapat. Sumber data mengacu pada tempat penelitian atau unit observasi. Jadi sumber adalah apa, siapa, dari mana informasi itu berasal (Sugiyono. 2016: 154).

Dalam hal ini penulis memakai metode snowball sampling dalam memperoleh informasi yang diinginkan. Snowball sampling merupakan tehnik pengambilan sampel untuk sumber data yang dimulai dari kecil kemudian berkembang (Sugiyono, 2010:219).

Sumber informan (narasumber) penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari beberapa informan, yaitu:

- 1) Pimpinan Sekolah
- 2) Bendahara Sekolah
- 3) Guru
- 4) Staff SDN Wadukopa
- 5) Masyarakat

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan Sumber Informasi untuk penelitian ini yaitu subyek darimana ia bisa didapat (Suharsimi Arikunto, 2006: 129). Jenis dan sumber data untuk penelitian ini:

3.4.1 Jenis Data

1. Jenis data primer

a. *Person*

Yaitu individu atau perseorangan. Sumber informasi yang bisa memberikan informasi seperti wawancara atau dalam penelitian ini disebut informan. Peneliti mewawancarai para kepala sekolah, bendahara sekolah, guru, staff SDN wadukopa, dan masyarakat yaitu tentang partisipasi masyarakat dan pengawasan penggunaan dana BOS di SDN Wadukopa Kec. Soromandi Kab. Bima.

b. *Place*

Itu adalah sesuatu yang digunakan untuk bertaruh (menyimpan, bertaruh, dll.) Wadah, ruang (ladang, rumah, dll. Dalam hal ini mengacu pada tempat atau keadaan yang sedang berlangsung dan mengacu pada masalah yang dibicarakan yaitu pengamatan partisipasi masyarakat dan pengawasan penggunaan dana BOS di SDN Wadukopa Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima.

c. *Paper*

yaitu sumber data yang mewakili informasi seperti huruf, angka, gambar serta simbol lainnya. Informasi itu bisa didapat dari buku manajemen perkantoran, data kependudukan, data struktur organisasi di SDN Wadukopa Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima.

2. Jenis Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber informasi penelitian yang diperoleh melalui media atau tidak langsung berupa buku, catatan, bukti atau arsip yang ada, baik yang diterbitkan maupun yang tidak dipublikasikan pada umumnya. Dengan kata lain, peneliti harus mengumpulkan informasi dengan mengunjungi perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca buku-buku yang berkaitan dengan penelitiannya.

3.4.2 Sumber Data

Sumber informasi mengacu pada siapa, apa dan dimana informan focus penelitian didapati. Sumber data mengacu pada lokasi dan unit penelitian atau unit observasi. Jadi sumber adalah asal, apa, siapa, darimana informasi itu berasal (Suhaesimi Arikunto. 2006:154).

Tabel 3.1 Sumber Data

No	Sumber Data	Keterangan
1	Primer	Kepala sekolah, bendahara sekolah, guru, staff SDN wadukopa, dan masyarakat.
2	Sekunder	Buku, Catatan atau Arsip data dana bos.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Data adalah sekumpulan informasi yang disimpan oleh media yang bisa dipisahkan dari informasi lain, ditelaah serta dihubungkan untuk suatu masalah tertentu “Data merupakan informasi penting dari obyek penelitian yang tersedia di tempat penelitian” (Burhan Bungin, 2011:69). Pengumpulan data merupakan proses yang sistematis serta terstandar supaya mendapatkan data yang dibutuhkan.

Pada bagian ini, peneliti menentukan metode dimana semua data penelitian akan disimpan dan dikumpulkan. Menentukan metode pengumpulan data harus relevan dengan masalah penelitian dan karakteristik sumber data, serta dasar pemikiran penggunaan metode pengumpulan data tersebut.

Menurut (Hadi Sutrisno, 2001:136) Sesuai dengan karakteristik data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan berikut digunakan:

1. Wawancara

Wawancara menurut (Sugiyono, 2010:74) merupakan langkah pengumpulan informasi untuk kepentingan penelitian antara penanya atau pewawancara dengan responden atau responden dengan menggunakan alat yang disebut pedoman wawancara. Dalam wawancara, Anda akan menerima informasi yang sesuai dengan informan. Walaupun strategil wawancara yang dipakai merupakan wawancara terbimbing adalah tanya jawab memakai bagan tanya jawab untuk acuan tanya jawab, kedua belah pihak memiliki peran yang berbeda. Untuk penelitian implementasi, penelitian memakai wawancara bebas atau wawancara tidak terstruktur sebab menurut penelitian cara ini cocok dalam menghasilkan kondisi wawancara yang santai, supaya informan bisa menjelaskan semua informasi yang peneliti inginkan tanpa ada yang disembunyikan.

2. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan manusia yang memakai panca indera mata untuk alatnya. Makanya, persepsi yaitu kemampuan seseorang untuk menggunakan persepsinya melalui kerja panca indera serta dibantu oleh panca indera lainnya. Dengan demikian, tehnik observasi ini dilakukan agar memperoleh informasi lebih lanjut tentang objek yang diteliti. Instruksi observasi yaitu alat dalam mengumpulkan informasi melalui observasi serta pendekatan sistematis terhadap berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan obyek penelitian.

Dilihat dari kerangka desain obyek yang diteliti, peneliti menggunakan cara observasi yang teratur. Pengamatan sistematis yaitu bahan yang akan diamati dengan merencanakan dan merumuskan pengamatan sebagai pedoman untuk melakukan pengamatan.

Peneliti terlibat dalam kegiatan masyarakat untuk mendorong transparansi anggaran desa dan melakukan observasi secara mendalam. Selama pengamatan sistematis, peneliti melakukan ini dengan merencanakan keadaan yang diamati oleh peneliti. Untuk pengamatan ini, peneliti mendapatkan gambaran umum partisipasi masyarakat dan pengawasan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN Wadukopa Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima.

3. Dokumentasi

Dokumentasi menurut (Suharsimi Arikunto, 2006: 231) Dokumentasi adalah mencari informasi tentang Barang atau variabel berupa catatan,

transkrip, buku, surat kabar, majalah, tulisan dan lain-lain. Teknik ini digunakan sebagai bukti dari wawancara dan wawasan dari sumber data dan bahan penelitian.

3.6 Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses pencarian informasi secara sistematis dari pengamatan, catatan lapangan, dan bahan lain dan menyusunnya sedemikian rupa sehingga mudah dipahami dan pengamatan itu dapat dibagikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, membaginya menjadi unit-unit, menggabungkannya menjadi formula, memilih yang paling penting dan dapat diteliti, serta membuat kesimpulan yang bisadibagikan kepada orang lain. (Sugiyono, 2013: 244)

Menurut (Syharsimi Arikunto, 2006: 16) Analisis data terdiri dari tiga aliran aktivitas yang terjadi secara bersamaan, yaitu:

1. Reduksi Data

Banyak informasi yang dikumpulkan saat itu juga, sehingga harus dicatat dengan cermat dan detail. Reduksi data berarti meringkas, memilih yang hakiki, memfokuskan yang hakiki, mencari tema pola. Data yang direduksi dengan demikian memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data dan mencarinya jika diperlukan. (Afifuddin, 2012: 159)

2. Penyajian Data

Langkah Kemudian yaitu menampilkan data. Untuk penelitian kualitatif, materi biasanya disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan alur bagian dan sejenisnya. Sugiyono, (2013: 249) menyatakan teks

naratif paling sering dipakai dalam mempresetasikan data dalam penelitian kualitatif. Representasi data merupakan upaya dalam mengatur kumpulan data menjadi matriks yang mudah dipahami. Pengaturan semacam itu bisa untuk menarik kesimpulan serta mengambil perlakuan.

3. Penarikan Data

Dari catatan berbagai sumber yang ada dan hasil observasi, bisa disimpulkan bahwa permasalahan pas dengan topik penelitian. Carayang digunakan peneliti untuk menelaah data penelitian yaitu induktif. Metode induktif merupakan cara yang dievaluasi dengan analisis berbagai data penelitian dan kemudian mengarah pada kesimpulan tentang karakteristik umum tertentu.

Metode induktif yaitu prosedur di mana penulismengumpulkan informasi serta mengembangkan teori darinya. Dimana menganalisis dan menuliskan dalam laporan informasi yang peneliti dapat kumpulkan di lokasi penelitian, dari observasi, wawancara dan dokumentasi berupa informasi yang diperoleh dari SDN Wadukopa Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima. Penerapannya adalah dengan cara mengolah data yang masih umum yang berupa jawaban dari kepala sekolah, bendahara sekolah, guru, staff SDN Wadukopa, dan masyarakat.

4. Penarikan kesimpulan

Menurut *Milles* dan *Hiberman*, langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah menarik dan menguji kesimpulan. Kesimpulan awal yang disampaikan bersifat sementara dan akan berubah jika bukti yang

meyakinkan tidak ditemukan pada tahap penyidikan selanjutnya. Namun jika kesimpulan yang ditarik sejak awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan pengumpulan data, maka kesimpulan yang disajikan merupakan kesimpulan yang masuk akal.

3.7 Keabsahan Data

Penelitian kualitatif harus mengungkapkan kebenaran objektif. Dengan demikian validitas kredibilitas (kepercayaan) data penelitian kualitatif dapat tercapai. Triangulasi dilakukan dalam penelitian ini untuk menjaga akurasi data. Triangulasi adalah teknik validasi data yang menggunakan sesuatu selain data untuk memverifikasi atau membandingkan data. (Moleong, 2007: 29).

dalam memenuhi keabsahan penelitian ini dilaksanakan triangulasi data dengan sumber. Menurut Patton, triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan memverifikasi keandalan informasi yang didapat melalui waktu serta instrumen penelitian kualitatif yang lain. (Moleong, 2007: 29).